

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adimas Wahyu Hidayat. (2016). *Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen*. Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- A. Ridwan Halim. (1988). *Hukum Agraria dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aminuddin Ilmar. (2012). *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Anugrahdwi. (2023). *Material, Fungsi dan Kedudukan Hukum Pajak*. Retrieved from <https://pascasarjana.umsu.ac.id/material-fungsi-dan-kedudukan-hukum-pajak/>
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Bustamar Ayza. (2018). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- G. Kertasapoetra, et.al. (1985). *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Habib Adjie. (2020). *Tanah, Rakyat dan Penanaman Modal, Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (2)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Harun Al Rashid. (1987). *Sekilas tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Jan, T. S. (2022). *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak*. Edisi ke II. Bandung: Penerbit Alumni.
- Marihot Pahala Siahaan. (2010). *Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB, Panduan dalam Penyusunan Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martin Roestamy. (2011). *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti bagi Asing Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Djafar Saidi. (2010). *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Djafar Saidi. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Sadi Is, et.al. (2022). *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Padmo Wahjono. (1984). *Undang-undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Salim HS. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Urip Santoso. (2014). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Y. Sri Pudiarmoko. (2002). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Jurnal

- Bangkit Cahyono. (2021). *Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa*. Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business), Volume 2 Nomor 2, 77-89.
- Hartana, I.G.A., & Candraswati, A. Mas. (2019). *Hukum Tanah sebagai Bagian dari Hukum Agraria dalam Pembangunan Nasional di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 7 No. 3, 115-123.
- Reda Manthovani & Istiqomah. (2017). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia, Volume 2, Nomor 2, 24-30.
- Riskha Indah Respati, et.al. (2020). *Asas Certainty dalam Mekanisme Pembayaran Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11, Nomor 3.
- Satria Braja Harianja, et.al. (2019). *Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah*. Jurnal Hukum Responsif, Volume 7 Nomor 7, 115-125.
- Syalwi Afrianti. (2022). *Kewajiban Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan*. Tesis, Universitas Hasanuddin.
- Sri Wahyuni Yusuf. (2023). *Kedudukan Roya Hak Tanggungan Elektronik terkait Pelunasan Utang oleh Pihak Ketiga*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Peraturan daerah Kota Makassar nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan daerah Kabupaten Sidrap nomor 3 tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah

Berita

Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). *Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Menjadi Pajak Daerah*. Retrieved from <https://jabar.bpk.go.id/pengalihan-pemungutan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan-menjadi-pajak-daerah/>

Tim Hukum Online. (2023). *Tujuh Asas-asas Hukum Agraria dalam UUPA*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-agraria-lt646201e7068e8/>